

URGENSI ULAMA HUDA DALAM REFLEKSI KOMUNIKASI POLITIK DI ACEH

Kamaruzzaman

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

kamzem2stain@yahoo.com

Article:

Received: April, 2024

Accepted: Mei, 2024

Published: Juni, 2024

© 2023 The Author(s).



This is an open-access article
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Correspondence Address:

kamzem2stain@yahoo.com

Abstrak: Ulama HUDA memiliki peran krusial sebagai katalisator bagi masyarakat Aceh, menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan ulama HUDA dalam komunikasi politik Aceh menjadi harapan bersama, baik dari pihak TNI maupun GAM. Komunikasi politik yang intens yang dilakukan oleh ulama HUDA melalui berbagai media, Meunasah, dan pertemuan dengan Presiden SBY di Istana Jakarta memberikan dampak positif dalam menciptakan perdamaian di Aceh. Sistem komunikasi yang dibangun oleh ulama HUDA dalam penyelesaian konflik Aceh menggunakan pendekatan teknik komunikasi persuasif, mengajak pihak-pihak yang berseteru seperti GAM dan RI serta elemen sipil lainnya. Ulama HUDA diakui sebagai denamisator dan konstibusi ide, memberikan saran dan sugesti dalam penyelesaian konflik Aceh dengan mengaitkan nilai-nilai Islam. Komunikasi politik ulama HUDA juga melibatkan tokoh Malaysia seperti Nik Abu Azis, Mahatir Muhammad, serta intensitas komunikasinya terlihat dalam pertemuan dengan ulama di Desa Alue Papien Kecamatan Nisam. Selain itu, ulama HUDA menjalin komunikasi baik dengan Polisi Eropa, HDC sebagai LSM Luar Negeri, dan pihak lainnya.

Kata Kunci: Urgensi, Ulama Huda, Refleksi, Komunikasi Politik, Aceh.

Abstract: Ulama HUDA plays a pivotal role as a catalyst for the people of Aceh, serving as an exemplary figure in all facets of social life. Conflicting parties, TNI-GAM eagerly anticipate the engagement of HUDA scholars in Aceh's political communication. The intensity of political communication crafted by the ulama significantly contributed to establishing peace in Aceh. Ulama communicated politically through various channels, including media, Meunasah, and meetings with President SBY at the Jakarta Palace. The communication system developed by HUDA scholars for resolving the Aceh conflict employ

a persuasive communication technique to engage conflicting parties such as GAM and RI, along with other civil elements. Recognized as denominators and contributors of ideas, HUDA Ulama hold a crucial position in the eyes of both GAM and RI, presenting suggestions for resolving the Aceh conflict with a persuasive communication system that often incorporates Islamic principles. The political communication of HUDA scholars extends harmoniously to Malaysian figures like Nik Abu Azis, Mahathir Muhammad, with frequent interactions demonstrated through meetings with all ulemas in Alue Papen Village, Kec. Nisam. Additionally, HUDA scholars have established effective communication channels with the European Police, HDC as a Foreign NGO, and various other entities.

Keyword: Urgency, Scholars of Guidance, Reflection, Political Communication, Aceh.

Pendahuluan

Ulama di Aceh selalu menjadi tokoh yang dihormati, bukan hanya dalam konteks sosial keagamaan, namun juga mendapat penghargaan dan rasa hormat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹ Kehadiran ulama, terutama Ulama HUDA, memiliki peran signifikan dalam mediasi konflik berkepanjangan antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).² Meskipun sebagian besar masyarakat Aceh mungkin telah melupakan sejarah konflik tersebut, refleksi atas peran Ulama HUDA dalam penyelesaian konflik menjadi suatu kajian yang penting dan perlu dikenang.

Sejarah konflik Aceh menjadi bagian penting dari warisan kolektif masyarakat, dan Ulama HUDA menjadi ikon kebijaksanaan yang dihormati oleh masyarakat Aceh. Perannya dalam mediasi konflik menjadi kajian menarik yang memiliki relevansi tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dan dunia internasional dalam konteks manajemen konflik di suatu negara. Kearifan Ulama HUDA dalam menangani konflik menciptakan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran ulama dalam mencapai perdamaian, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran bagi masyarakat Aceh dan dunia pada umumnya.

¹ Zulfikar Fikar, 'Dakwah Ulama Dayah Aceh Di Masa Pandemi', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 6.1 (2022), 132–46 <<https://doi.org/10.14421/panangkaran.v6i1.2788>>.

² Aslam Nur, 'Ualama Dayah Dalam Dinamika Sosial Dan Budaya Masyarakat Aceh Di Awal Abad Kedua Puluh Satu', *Humaniora*, 23.1 (2011), 315–25.

Peran ulama HUDA dalam penyelesaian konflik Aceh dapat dianalisis melalui sejumlah fase yang melibatkan konflik tersebut. Fase-fase tersebut meliputi periode referendum, pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus, opsi Syariat Islam, hingga pasca-tsunami dan masa rehabilitasi-rekonstruksi Aceh.

Pada fase referendum, ulama HUDA turut aktif memberikan arahan dan pandangan terkait proses politik dan keagamaan yang melibatkan masyarakat Aceh. Dalam implementasi Undang-undang Otonomi Khusus, peran ulama HUDA semakin meningkat sebagai penentu kebijakan lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketika muncul opsi penerapan Syariat Islam, ulama HUDA menjadi pengemban nilai-nilai agama dalam pembentukan kebijakan, memberikan landasan etika bagi pengelolaan wilayah.

Masa pasca-tsunami dan rehabilitasi-rekonstruksi Aceh menunjukkan kontribusi ulama HUDA dalam membangun kembali komunitas, tidak hanya secara fisik tetapi juga spiritual. Peran ulama HUDA selama fase-fase tersebut menjadi landasan untuk memahami peran ulama dalam konteks penyelesaian konflik, melibatkan aspek politik, sosial, dan keagamaan. Analisis peran ulama HUDA ini memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika konflik Aceh dan relevansinya dalam pemahaman peran ulama dalam konteks penyelesaian konflik di tingkat lokal dan nasional.

Metode Penelitian

Studi ini mengadopsi pendekatan metode campuran, mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Aspek kualitatif melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh Ulama Huda dan pemangku kepentingan politik di Aceh. Wawancara ini bertujuan untuk menangkap wawasan mendalam terhadap peran Ulama Huda dalam membentuk dinamika komunikasi politik.

Selain itu, dilakukan analisis konten terhadap teks-teks keagamaan yang relevan, pidato, dan wacana politik untuk menentukan pola dan tema terkait keterlibatan Ulama Huda dalam komunikasi politik. Analisis teks ini memberikan pemahaman yang lebih

dalam tentang landasan ideologis dan strategi pesan yang digunakan oleh Ulama Huda dalam konteks politik Aceh.

Dari segi kuantitatif, survei didistribusikan di antara sampel yang beragam dari penduduk Aceh untuk mengukur persepsi publik terhadap pengaruh Ulama Huda dalam komunikasi politik. Hasil survei dikenakan analisis statistik untuk mengidentifikasi tren dan korelasi, memberikan dimensi kuantitatif pada penelitian.

Selanjutnya, analisis komparatif data historis digunakan untuk melacak evolusi peran

Ulama Huda dalam komunikasi politik dari waktu ke waktu. Perspektif longitudinal ini meningkatkan kedalaman penelitian dengan meneliti bagaimana perubahan sosial-politik telah mempengaruhi keterlibatan Ulama Huda dalam membentuk lanskap komunikasi di Aceh.

Sebagai kesimpulan, kombinasi sistematis dari wawancara kualitatif, analisis konten, survei, dan analisis komparatif historis membentuk metodologi yang kokoh untuk menjelajahi urgensi Ulama Huda dalam refleksi dinamika komunikasi politik di Aceh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan ulama dalam penyelesaian konflik Aceh, seperti pada Cessation of Hostilities Agreement (CoHA), tidak segera terjadi seiring dengan peristiwa referendum, Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus), dan Undang-Undang Pemilihan Aceh (UUPA). Ulama yang terlibat dalam CoHA, seperti Tgk. H. Imam Syuja', Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, dan Dr. Tgk. H. Daniel Djuned, mengakui bahwa keterlibatan mereka bersifat personal dan diakui memiliki pengaruh di mata masyarakat, baik oleh TNI maupun GAM. Ulama tidak mengatasnamakan lembaga yang dipimpinnya, melainkan mengedepankan peran personal dalam upaya penyelesaian konflik.

Pada masa tersebut, keterlibatan ulama yang bersifat lebih rasional, seperti Imam Syuja' dan yang lainnya, dapat dijelaskan oleh kepercayaan yang masih diberikan kepada ulama oleh pihak GAM dan TNI, sebagaimana disampaikan oleh Abu Panton (2010). Imam Syuja' menambahkan bahwa keterlibatan ulama bertujuan memberikan nuansa moral dan kultural ke Aceh, mengingat Hasan Tiro sendiri memiliki latar belakang sebagai keturunan

ulama. Dalam proses penyelesaian konflik, ulama diharapkan mampu memberikan nuansa dan perspektif yang berbeda. Di sisi lain, ulama HUDA dan RTA tampak lebih hati-hati, tidak terlalu bersedia untuk maju ke depan, dan peran mereka lebih banyak dirasakan oleh masyarakat sebagai pengayom dan pendamping.

Bukti lain keseriusan Ulama HUDA dalam mencari solusi untuk Aceh termanifestasi pada tanggal 8-9 April 2005, di mana sekitar 600 ulama dari seluruh Aceh berkumpul untuk silaturahmi dan musyawarah di gedung AAC Dayan Dawood. Dari pertemuan ini, dihasilkan 11 rekomendasi ulama yang dibacakan oleh Tgk. Faisal Ali, yang saat itu menjabat sebagai ketua RTA dan kini menjabat sebagai sekretaris HUDA, bersama dengan Tgk. Ali Imran memainkan peran penting dalam merumuskan rekomendasi ulama HUDA. Keberhasilan ulama HUDA dalam merumuskan rekomendasi menandakan komitmen serta kontribusi mereka dalam mencari solusi bagi permasalahan Aceh pada periode tersebut.

Pada 12 April 2005, dilangsungkan dialog lanjutan di Vaanta Helsinki. Dalam putaran ini, perbincangan antara kedua belah pihak menunjukkan banyak kesepakatan, berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang lebih sering diwarnai perdebatan. Pembahasan krusial melibatkan isu Self Government, simbol-simbol dan lagu daerah, serta pendelegasian kewenangan pemerintah pusat ke Aceh. Terkait substansi yang dibahas, terjadi pro dan kontra di kalangan elit politik tanah air, seperti disuarakan oleh beberapa anggota DPR, seperti Permadi, A.S Hikam (F-KB), dan Djoko Susilo (F-PAN). Meskipun demikian, banyak yang mendukung perjanjian Helsinki, khususnya mereka yang tergabung dalam koalisi kerakyatan.

Terlepas dari berbagai tarik ulur tersebut, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2006 disahkan penandatanganan perjanjian damai *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki antara pemerintah RI dan GAM.³ Dicapainya kesepakatan damai ini tidak dapat dilepaskan adanya peran besar dari CMI (Crisis Management Initiative) yang dipimpin Marti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia. CMI disepakati oleh pihak RI dan GAM untuk menjadi mediator perundingan damai antara keduanya setelah sekian lama vakum. Dalam

³ Reni Kumalasari, 'RELASI AGAMA DAN POLITIK DI ACEH PASCA KONFLIK; Pemerintah Indonesia-Gerakan Aceh Merdeka', *Jurnal Adabiya*, 23.1 (2021), 1 <<https://doi.org/10.22373/adabiya.v23i1.7592>>.

penandatanganan ini MoU Helsinki ini pihak GAM diwakili oleh Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud, dan Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin.

Prosesi bersejarah itu disaksikan ratusan orang yang terdiri dari anggota delegasi kedua belah pihak, para pimpinan dan staf Crisis Management Initiative (CMI), serta sejumlah tokoh dan ulama yang diundang khusus. Upacara yang diliput puluhan media cetak dan elektronik internasional itu juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Finlandia, Erkki Tuomioja, Duta Besar Inggris untuk Finlandia, Matthew Jirk, serta perwakilan dari Uni Eropa dan ASEAN. Saksi penandatanganan adalah mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, yang juga Ketua Dewan Eksekutif CMI, lembaga yang memfasilitasi perundingan damai itu. Di Aceh sendiri, puluhan ribu masyarakat menyaksikan proses siaran langsung penandatanganan MoU itu melalui televisi di depan Mesjid Raya Baiturrahman maupun di warung-warung kopi seluruh Aceh. pada saat itu, keheningan dan pengharapan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat yang penuh masa depan.

Perumusan UUPA

Setelah perjanjian damai ditandatangani, kedua belah pihak sepakat untuk membahas rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sebagaimana diamanatkan oleh MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dalam perjalanannya, banyak ulama yang terlibat dalam proses diskusi perancangan undang-undang tersebut. Menurut Tgk. H. Faisal Ali, Sekjen HUDA, Tgk. Bulqaini Tanjongan, dan Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi Amiruddin, ulama HUDA melalui RTA mengadakan pertemuan di Lhokseumawe yang disponsori oleh TIFA dua bulan sebelum UUPA disahkan. Salah satu rekomendasi penting dari pertemuan tersebut, selain menegaskan pelaksanaan agenda syari'at Islam, adalah keterlibatan ulama dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah dan kemungkinan ulama dapat diposisikan sejajar dengan legislatif. Forum itu menuntut kejelasan, kesetaraan, dan peningkatan peran ulama, seperti di eksekutif dan legislatif, dalam pembuatan qanun yang berkewajiban mendengarkan pertimbangan dari MPU. Ulama Dayah Inshafuddin dan unsur MPU NAD juga hadir dalam forum tersebut.

Dari sudut pandang lain, penyelesaian konflik Aceh tidak hanya bergantung pada Ulama HUDA saja, melainkan melibatkan pihak-pihak lain, terutama peran Mediator dari masyarakat internasional yang merasa terpanggil oleh jiwa kemanusiaan. Penting diakui bahwa perundingan tidak akan efektif tanpa mediator atau fasilitator. Konflik Aceh tidak akan terselesaikan tanpa campur tangan mediator yang dapat mempercepat tercapainya kesepakatan antara Aceh dan Jakarta.

Libatkan mediator asing dalam penanganan Aceh diinginkan dan direkomendasikan oleh banyak pihak. Hasan Basri M. Nur, dalam tulisannya "International Presence Needed to Secure Aceh" di Harian The Jakarta Post pada 26 Februari 2002, menyatakan bahwa peran mediator asing tidak dapat dihindari dalam penyelesaian konflik Aceh. Menurutnya, kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah sudah menipis, oleh karena itu, mediator harus berasal dari lembaga yang kuat, netral, independen, dan dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan.

Henry Dunant Center (HDC) yang memfasilitasi perundingan antara RI dan GAM pada tahun 2000-2003 memberikan kontribusi penting untuk penyelesaian konflik Aceh, walaupun hasilnya tidak langsung terwujud secara konkret dan abadi. Kesepakatan jeda kemanusiaan dan CoHA tercapai berkat peran lembaga asing tersebut, meskipun terjadi perkecokan kembali, termasuk pengangkatan juru runding GAM di Hotel Kuala Tripa. Demikian juga, CMI diakui sebagai mediator yang berjasa dalam membawa damai bagi dua kubu yang saling bermusuhan selama puluhan tahun.

Perundingan yang dimediasi CMI menghasilkan kesepakatan positif untuk mengakhiri konflik Aceh. HDC dan CMI, meskipun bukan lembaga agama dan berasal dari negara non-Islam, berperan mulia dalam mendamaikan kedua pihak. Peran HDC dan CMI dianggap sebagai pekerjaan yang Islami, meskipun pemiliknya bukan Muslim. Masyarakat Aceh mendukung keterlibatan CMI dalam mencapai perdamaian, terbukti dengan doa dan sujud syukur setelah MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Post-tsunami, ulama, seperti Abu Pantan, berperan aktif membantu pengungsi, membuktikan bahwa ulama menjadi tempat perlindungan bagi rakyat. Meskipun kontroversial, ulama juga diminta perlindungan pada masa konflik bersenjata antara GAM dan RI, menunjukkan peran

mereka dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ulama HUDA Simbol Perdamaian di Aceh

Himpunan Ulama Dayah (HUDA) memegang peran penting dalam sistem kemasyarakatan dan pemerintahan di Aceh. Sebagai pemimpin masyarakat, HUDA memiliki tanggung jawab untuk memandu anggota masyarakatnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan duniawi dan spiritual. Posisi dan peran HUDA yang baik menunjukkan efektivitas komunikasi mereka dalam mencapai perdamaian di Aceh. Mereka berfungsi sebagai pemimpin yang membimbing dinamika masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang telah diakui dan dipegang teguh oleh kelompok tersebut. Keberadaan HUDA menjadi gambaran penting dalam memahami peran ulama dalam membentuk harmoni dan ketentraman di tingkat masyarakat.

Pada masa konflik, HUDA mempunyai peran yang sangat penting di dalam menyertai perjalanan panjang konflik dan perdamaian Aceh khususnya pada tahun 1999 hingga 2006. HUDA sebagaimana diungkapkan oleh Abu Darkasyi, bahwa masyarakat sangat antusias dan menyambut baik keterlibatannya dan berperan dalam mengkomunikasikan pesan-pesan perdamaian dengan berbagai keinginan dari pihak-pihak yang bertikai. Abu Darkasyi (2010) Lebih lanjut, Abu Darkasyi menyatakan bahwa kewibawaan ulama masih meresap dalam setiap individu masyarakat Aceh, terutama di kalangan ulama HUDA yang memainkan peran strategis dalam membangun jaringan dan komunikasi antar organisasi.

Hal ini menjadi landasan untuk membangun kepercayaan yang kokoh terhadap ulama HUDA dalam penyelesaian konflik Aceh. Ide dan gagasan yang disampaikan oleh HUDA selalu dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan GAM. Peran HUDA pada periode 1999-2006 sangat signifikan, sehingga setiap tahapan dan proses perdamaian melibatkan ulama HUDA sebagai pendamping. Sebagai contoh, Abu Pantan, sebagai pimpinan HUDA, secara berkala diminta pandangan dan pemikirannya mengenai situasi politik di Aceh oleh empat presiden Indonesia: Soeharto,

Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengundangnya ke Istana Negara untuk berkonsultasi. Ibrahim Panton: (2010).

Dengan demikian, dapat dikatakan ulama HUDA mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting di dalam melakukan komunikasi politik dalam proses perdamaian Aceh. HUDA tidak hanya menjadi bagian dari peran yang harus dijalankan, tetapi juga mempengaruhi baik di dalam sistem ide maupun sistem sosial masyarakat Aceh. Ulama HUDA menjadi salah satu *decision maker*, yang terlibat di dalam pengambilan sebuah keputusan yang amat penting sehingga dapat mempengaruhi kebijakan politik dan konflik Aceh. Selaras dengan hal ini Abu Darkasyi juga mengatakan bahwa upaya-upaya penyelesaian konflik terus dilakukan sepanjang konflik belum selesai, mulai tahun 1999 hingga tahun 2006 ulama HUDA melakukan berbagai upaya untuk menemukan titik klimaks penyelesaian secara objektif dan komprehensif. Bahwa ulama HUDA tanpa jenuh melakukan penyelesaian konflik Aceh karena menurut pemahaman ulama HUDA agama Islam yang ada di Aceh ini jangan ternoda atau terkotak katik oleh sesamanya.

Sistem komunikasi yang dibangun oleh ulama HUDA dalam penyelesaian konflik Aceh dengan menggunakan pendekatan teknik komunikasi persuasif dalam upaya mengajak para pihak yang bertikai GAM dan RI serta elemen sipil lainnya. Ulama HUDA memiliki posisi penting yang oleh kedua belah pihak GAM dan RI dipandang sebagai denamisator serta konstibusi ide, sugesti dalam penyelesaian konflik Aceh, sistem komunikasi persuasif yang sering disampaikan ketika pertemuan dengan tokoh GAM dan RI dengan mengaitkan kata-kata Islam sebagai contoh “kita bagaikan tubuh yang satu”.

Disisi lain efektifitas komunikasi politik Ulama HUDA sebagaimana diungkapkan oleh Ruslan, komunikasi politik ulama HUDA terlihat dari seringnya dilakukan rapat koordinasi pada setiap ada persoalan baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, pada masa konflik berkecamuk kadangkala terasa sulit untuk membuat rapat terbuka karena ada pihak – pihak yang tidak ingin Aceh damai senantiasa melibatkan ulama HUDA. Ruslan (2010)

Disamping itu pula Ulama HUDA memiliki akses komunikasi politik yang kuat dengan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian konflik seperti pertemuan COHA

(Cossation of Hostility for Aceh), pada tahun 2001 di Jakarta. Satu icon yang tak terlupakan Ulama HUDA pada saat itu dikenal dengan Ulama COHA lelucon versi SBY pada saat itu beliau masih menjabat Menkopolkam. Pada waktu pertemuan tersebut Ulama HUDA menghadirkan sejumlah 15 orang, tidak hanya itu saja keterlibatan komunikasi Ulama HUDA, akan tetapi Ulama HUDA turut andil didalam even-even strategis seperti proses perdamaian MOU (Memorendum Of Understanding), di Helsinki Finlandia.

Berbagai prestasi Ulama HUDA di atas bukan serta merta didapat, akan tetapi proses tersebut memerlukan energi yang banyak dan membutuhkan tantangan dan pengorbanan yang luarbiasa baik finansial, krisis sumber daya, serta bentuk ancaman pembubaran ulama HUDA dari OTK (Orang Tak Dikenal), maupun ancaman BOM terhadap pengurus ulama HUDA oleh pihak – pihak tertentu yang saban hari dialami oleh Ulama HUDA.

Pada tahun 1999, terjadi konflik dahsyat di Aceh di mana kantor pemerintah dan lembaga pendidikan dirusak dan dihancurkan oleh Organisasi Tidak Dikenal (OTK). Konflik ini disebabkan oleh adu domba antara pihak yang mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengakibatkan masyarakat Aceh menjadi korban kekerasan kedua belah pihak. Ulama Himpunan Ulama Dayah (HUDA) terlibat dalam komunikasi politik dengan terjun ke lapangan di setiap daerah yang mengalami kekerasan. Mereka berusaha berkomunikasi secara persuasif dengan pihak penguasa Darurat Militer Bambang Darmono untuk menegakkan sisi kemanusiaan. Selain itu, mereka juga melakukan pendekatan dengan GAM untuk menjaga aspek kemanusiaan dalam upaya menyelesaikan konflik.

Masyarakat sangat antusias dengan partisipasi Ulama Huda dalam penyelesaian konflik Aceh. Keterlibatan komunikasi politik Ulama Huda berperan besar dalam menangani konflik. Ulama HUDA berhasil menjalin komunikasi efektif, bahkan mampu mengajak tokoh kunci di Indonesia, seperti Bondan Gunawan, yang saat itu menjabat sebagai MenSosNeg (Menteri Sosial dan Negara). Selain itu, mereka juga berhasil mempertemukan tokoh kunci GAM, Abdullah Syafii, untuk membahas solusi perdamaian

Aceh pada tahun 1999. Keberhasilan ini mencerminkan dampak positif keterlibatan Ulama Huda dalam merintis jalan menuju perdamaian di Aceh. Boihaki (2010)

Komunikasi politik ulama HUDA terjalin lancar dengan tokoh Malaysia, termasuk Nik Abu Azis dan Mahathir Muhammad. Intensitas komunikasi ulama HUDA terlihat dalam pertemuan dengan seluruh ulama di Desa Alue Papeh, Kecamatan Nisam. Di samping itu, ulama HUDA juga menjalin hubungan komunikasi dengan Polisi Eropa, HDC sebagai LSM luar negeri, dan pihak lainnya. Media yang kerap digunakan dalam mensosialisasikan penyelesaian konflik Aceh oleh ulama HUDA mencakup majlis ta'lim, ceramah dari masjid ke masjid, dan siaran pers melalui radio. Keberhasilan ulama HUDA dalam membangun jaringan komunikasi ini menunjukkan peran mereka yang signifikan dalam upaya penyelesaian konflik di Aceh.

Kesimpulan

Dalam rentang waktu 1999-2006, terjadi pergeseran dalam legitimasi komunikasi politik ulama HUDA dalam penyelesaian konflik Aceh. Pergeseran ini dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik pada setiap fase sejarah, seperti referendum, UU Otonomi Khusus (Otsus), Cessation of Hostilities Agreement (CoHA), dan Undang-Undang Pemilihan Aceh (UUPA). Pada masa referendum, ulama HUDA aktif terlibat dan berperan signifikan. Namun, pada periode UU Otsus dan CoHA, peran ulama HUDA tidak begitu mencolok, meskipun tetap terlibat dalam pendampingan dan pengayoman di tingkat masyarakat bawah. Saat UUPA, ulama HUDA lebih terbuka dan aktif memberikan masukan sejalan dengan iklim demokrasi.

Pola komunikasi dan peran ulama HUDA dalam penyelesaian konflik sangat tergantung pada dinamika sosial-politik. Mereka terlibat dalam komunikasi formal dan informal, terkadang tampil atas nama pribadi atau lembaga. Ulama HUDA berperan dalam rekonsiliasi konflik, menggunakan pendekatan moral dan kultural ke-Acehan. Meskipun cenderung low profile, ulama HUDA membangun komunikasi efektif dengan berbagai pihak, terbukti melalui keterlibatan dalam penyusunan UUPA dan peran dalam negosiasi dengan pihak yang bertikai di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Abbas Adan, Gazali, *Win-win Solution Penyelesaian Aceh*, dalam Musni Umar (ed).
- Abu Jihad, *Hasan Tiro dan Pergolakan Aceh*, Aksara Centra, t.tp, t.th.
- Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Cetakan Pertama Jakarta: Kencana, 2005.
- Al-Chaidar, *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Sebagai Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Ali Hasjmi, *Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- , *Semangat Merdeka: 70 tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Alfian (ed), *Segi-Segi Sosial Masyarakat Aceh*, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES, 1977.
- _____, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Pertama, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999.
- Anthony Reid, *Awal Mula Konflik Aceh*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ardial, *Komunikasi Politik*, Cet. II, Jakarta, 2010.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, Cetakan Pertama, Bandung: Mizan, 2002.
- , *Jaringan Ulama Timur dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2004.
- Bardan, Ibrahim, H, *Resolusi Konflik Dalam Islam: kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*, Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2008.
- Betty R. Scharf , *Sosiologi Agama*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana 2004.
- Clive J. Cristie, A. *Modern History of Southeast Asia: Decolonialization, Nationalism, and Sparatism*, New York: Tauris Academic Studies, I.B.Tauris Publisher.
- C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Grafitpers, 1983.

Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Dr. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka: Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

H. C. Zentgraaff, *Aceh*, Cetakan Pertama, Jakarta: Beuna, 1983.

Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung Untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung Untuk kepentingan Daerah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Garfity, 1992.

Harun, Rochajad dan Sumarno HP, *Komunikasi Poliltik Sebagai Suatu Pengantar*, Cet. Pertama, Bandung: Mandar Maju, 2006.

H. M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Cetakan Pertama, Medan: Iskandar Muda, , 1961.

Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2004.

Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, Cetakan pertama, Jogjakarta: UII Press, 2004.

-----, *Islam Historis, Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Galang Press, 2002.

Kholil, Syukur, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Cet. Pertama, Bandung: Citapustaka Media, 2006.

Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.